

Pembinaan Manajemen Pedagang Sektor Informal Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kulon Progo

**oleh:
F. Winarni
FISE UNY**

Abstrak

Tumbuhnya sektor informal pada dekade pasca krisis ekonomi merupakan gejala positif dalam meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usahanya perlu adanya pembinaan manajemen bagi pedagang sektor informal. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pola pembinaan manajemen bagi para pedagang sektor informal dalam rangka program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan yang merupakan instansi kedinasan yang bertanggung jawab telah melakukan pembinaan secara intensif berkaitan dengan aspek pemasaran, peningkatan kualitas produk, modal, dan pengelolaan usahanya. Pelaksanaan dilakukan secara berkala dan terkait dengan spesifikasi bidang usaha yang akan dikembangkan.

Hasil pembinaan manajemen menunjukkan adanya peningkatan kualitas produk, meluasnya pemasaran, menguatnya modal usaha, tata pelaporan keuangan yang lebih baik, dan meningkatnya jumlah pedagang yang membuka usaha baru. Beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembinaan manajemen pedagang sektor informal dari pihak Dinas adalah fasilitas operasional dan SDM baik jumlah maupun tingkat pendidikan yang sesuai dengan kepentingan lapangan. Sedangkan pada pihak para pedagang antara lain tingkat pendidikan mereka yang relatif rendah, kesesuaian waktu, antara usaha dan waktu pembinaan.

Kata kunci : Manajemen, Sektor Informal

Pendahuluan

Sejak bulan Juli 1997 Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang bermula dari terpuruknya nilai

tukar rupiah atas dollar AS yang mencapai titik dramatis (Gumilar, Kompas, 3-3-99) Struktur ekonomi kita ditandai oleh hadirnya swasta

yang kuat fondasi bisnisnya, ternyata banyak di antara mereka tertarik untuk menanamkan uangnya di sektor spekulatif, sehingga hancur usaha mereka tatkala dihadapkan pada fluktualisasi nilai tukar rupiah atas dollar yang terjadi. Sektor riil ikut macet yang diikuti oleh meledaknya angka pengangguran. Masyarakatpun merasakan pahitnya krisis ekonomi ketika dihadapkan pada melambungnya harga-harga.

Krisis (*crisis*) dimengerti secara umum sebagai "*an unstable or crucial time for state of affairs*" (*Webster's New Encyclopedic Dictionary*, 1994). Krisis sosial mengacu pada kehidupan masyarakat yang penuh ketidakpastian, rawan, mempunyai kehosi yang rapuh, serta lemahnya peranan negara. Indikasi dari lahirnya krisis sosial dapat disimak dewasa ini seperti semakin menyedihkannya kualitas anak didik, semakin maraknya anak jalanan, rawan pangan yang merebak di perkotaan dan pedesaan, kualitas dan kuantitas kriminalitas melambung tajam, pelanggaran hak asasi yang makin dalam, lemahnya moral birokrasi, hubungan antar umat beragama dan kelompok yang destruktif bahkan cenderung lahirnya vendeta (balas dendam) seperti tergambar jelas pada kasus kerusuhan Ketapang, Kupang, Ambon, Kampung Rambutan dan sebagainya.

Salah satu dampak adanya krisis ekonomi yang sangat dirasakan oleh kelompok miskin dan tidak mem-

punyai ketrampilan yang cukup adalah membengkaknya angka pengangguran yang tersebar baik ditingkat perkotaan maupun dipedesaan, yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Sektor pertanian yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja, sekarang sudah tidak dapat diharapkan dengan semakin sempitnya lahan dan penggunaan teknologi pertanian. Banyak perusahaan barang dan jasa yang terpaksa menutup usaha dan memberhentikan para pekerja karena menderita kerugian akibat krisis ekonomi, dan lemahnya ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki yang sesuai tuntutan lapangan pekerjaan di sektor formal menyebabkan sebagian pekerja keluar dari sektor pertanian, barang dan jasa dan masuk di sektor informal di daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Sektor informal seringkali dianggap sebagai sektor yang mempunyai kemampuan menyerap angkatan kerja.

Sektor informal pada umumnya diartikan sebagai unit usaha berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan dan pendapatan bagi dirinya masing-masing, serta dalam usahanya dibatasi oleh faktor modal dan ketrampilan. Sektor informal ini kegiatan usahanya hampir sama dengan jenis usaha sendiri yang kecil, yang berusaha

sendiri maupun dengan dukungan anggota keluarga dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kegiatan usahanya di setiap sektor bukan hanya sektor jasa tetapi juga perdagangan, angkutan dan jasa kemasyarakatan.

Suatu penelitian yang telah dilakukan oleh Winarni Dkk tahun 2002 tentang keberadaan dan perkembangan pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya sebagai dampak dari dibukanya Program Diploma 3 (D3) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Kecamatan Pengasih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampus UNY yang terletak di Kecamatan Pengasih, mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat di sekitarnya. Dari segi ekonomi, dengan datangnya ratusan mahasiswa pada setiap tahun mampu menggerakkan roda ekonomi bagi masyarakat, misalnya usaha transportasi, warung makan, usaha pondokan, pedagang kaki lima, foto kopi, toko alat-alat tulis, jasa penterjemahan, persewaan komputer, persewaan video game dan sebagainya. Juga telah berkembang usaha lain seperti : bengkel, warung makan, wartel, toko kelontong, jasa laundry, penjahit, tukang becak, salon dan sebagainya. Sebagian besar pedagang kaki lima dan usaha-usaha lainnya menyatakan bahwa mereka merasa usahanya lebih maju dan berkembang dengan adanya kampus UNY.

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka sektor informal yang baru

tumbuh usahanya, dan dirasakan bagi mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup untuk bangkit kembali kemauan bekerjanya akibat tertutupnya lapangan usaha lama dan pemutusan hubungan kerja ataupun sebab-sebab lainnya, perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan. Realita di daerah-daerah lain keberadaan sektor informal atau populer dengan istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) karena kurangnya Pembinaan dari pemerintah, dan kurangnya akses dalam perencanaan pembangunan wilayah dan kurangnya tingkat pendidikan mereka, maka keberadaan usaha mereka selalu menempati posisi yang lemah dan dikejar-kejar untuk diusir, pada saat usaha mereka dengan susah payah dilakukan dan telah memberikan pemenuhan kebutuhan hidup walaupun dalam taraf yang pas-pasan. Sebagai contoh kasus pengurusan pedagang kaki lima di sekitar RS. Sarjito, di sekitar jalan selokan mataram, di sekitar alun-alun uyara Yogyakarta dan lain-lain yang baru-baru ini, menunjukkan ketidakpedulian pemerintah akan nasib kaum miskin yang ingin menghidupi keluarganya.

Tumbuhnya usaha sektor informal di satu sisi telah secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mobilitas sosial, mening-

katkan kualitas lingkungan, namun dapat juga menimbulkan ancaman keamanan, dan kerawanan sosial khususnya karena keberadaan mahasiswa yang cukup banyak di wilayah tersebut. Untuk itu perlu diimbangi dengan pembinaan pada masyarakat khususnya masyarakat pengusaha sektor informal agar mereka dapat lebih meningkatkan usahanya lebih maju lagi tanpa menimbulkan ancaman bagi perkembangan pembangunan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini perlu adanya peraturan-peraturan yang jelas bagi mereka sehingga mereka dapat memahami dan menyadari ketentuan yang harus dipatuhi baik untuk kepentingan diri pengusaha itu sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga diperlukan ketegasan dalam menegakkan peraturan di samping perlunya upaya pembinaan untuk meningkatkan harkat hidup masyarakat miskin melalui usaha di sektor informal ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tulisan ini akan membahas bagaimanakah pembinaan usaha sektor informal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan program pengentasan kemiskinan.

Pengertian Sektor Informal

Menurut Suharsono Sagir, sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang bersifat marginal (kecil-kecilan)

sebab kegiatannya tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, berdiri sendiri, berlaku di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak mengenal sistem perbankan maupun perkreditan (1989:149-140). Biasanya sektor informal ini membuka usaha di sekitar fasilitas umum dan bersifat tidak menetap. Salah satu bentuk usaha dari sektor informal yang marak saat ini adalah pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman.

Untuk membuka usaha ini diperlukan perjuangan yang berat, karena di samping masalah yang berkait dengan modal, lokasi dan pemasaran juga masalah persaingan antar sesama mereka yang sangat ketat. Modal kerja mereka umumnya kecil sehingga keuntungan yang diperolehnya pun kecil. Kesadaran mereka untuk bekerjasama di antara mereka juga belum kuat karena mereka umumnya bekerja sendiri-sendiri dan belum terorganisasi dengan baik. Dari segi pemasaran berkait dengan kualitas makanan dan minuman yang dijual dan lokasi usaha yang ramai dikunjungi orang yang kadang-kadang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah setempat karena dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

Munculnya pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman di sekitar fasilitas umum seperti rumah sakit, kampus, dan

jalan yang strategis, menunjukkan bahwa sektor informal ini merupakan usaha yang bersifat dinamis dan menguntungkan serta ekonomis. Meskipun masuk dalam kelompok pedagang kecil karena berpenghasilan rendah, ternyata dalam keadaan krisis pun mereka mampu bertahan hidup (*survive*). Para pelakunya mempunyai potensi sebagai wiraswasta yang kreatif. Akan tetapi sektor informal biasanya bergerak hanya dengan skala usaha yang kecil, hal ini disebabkan oleh sektor ekonomi yang menitik beratkan kebijakan pada pembinaan sektor formal (Sri Edi Swasono, 1994:12).

Sektor informal pedagang kaki lima merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dicermati. Usaha ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang strategis yang dikunjungi banyak orang. Mereka dengan modal relatif kecil berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen tertentu, karena barang yang dijual harganya terjangkau masyarakat umum.

Menurut Hernami F. Taslim, ada beberapa karakteristik pedagang kaki lima, yaitu:

1. Berusaha di kaki lima pada umumnya bukan pekerjaan yang dicita-citakan.
2. Para pedagang kaki lima tersebut pada umumnya tergolong tingkatan kerja produktif.
3. Tingkat pendidikan mereka relatif rendah.

4. Sebagian besar dari mereka adalah pedagang dari luar kota dan belum mendapat status sebagai penduduk permanen.
 5. Sebelum terjun di kaki lima mereka pada umumnya berprofesi sebagai petani atau buruh rendah.
 6. Modal diusahakan sendiri dan tidak punya hubungan dengan lembaga keuangan perbankan.
 7. Modal yang dimiliki sangat terbatas demikian pula dengan omset usaha serta profit yang diperoleh.
 8. Kemampuan kewirausahaan relatif rendah demikian pula kemampuan dalam pemupukan modal.
 9. Jenis dagangan sangat variatif namun yang cukup dominan adalah jenis pangan, sandang dan jenis kebutuhan sekunder lainnya.
 10. Pada dasarnya mereka ikut terkena pajak dengan adanya retribusi dari berbagai jenis pungutan lainnya.
- Instansi yang selama ini banyak memberikan perhatian dan pembinaan bagi para pekerja sektor informal adalah Biro Bina Sosial. Biro ini mengeluarkan definisi dan ciri-ciri lapangan kerja sektor informal sebagai berikut:
- " sektor informal ialah kegiatan ekonomi marginal (usaha

kecil-kecilan) yang mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, permolan dan penghasilan.
2. Tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan biasanya terpisah dengan tempat kerjanya.
3. Perlengkapan kegiatan serta omzetnya, biasanya dilakukan atas dasar perhitungan harian.
4. Dilakukan oleh dan untuk melayani kelompok masyarakat tertentu.
5. Tidak menuntut keahlian dan ketrampilan khusus, sehingga secara luas dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan" (Biro Bina Sosial, 1995:4).

Berdasarkan ciri-ciri di atas maka warung, pedagang kaki lima maupun pedagang kecil lainnya dapat dimasukkan dalam kelompok sektor informal. Menurut Tadjudin, walaupun pedagang kaki lima merupakan sektor pinggiran namun eksistensinya memberikan banyak kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat di negara-negara berkembang. Dipandang dari segi keamanan, sektor ini bisa berfungsi sebagai katup pengaman yaitu memberikan kesempatan kesibukan kerja usaha kecil-kecilan dengan usaha dagang atau jual beli (1995:23). Tanpa katup pengaman tersebut kemungkinan akan timbul banyak kekerasan dan rasa tidak puas.

Dengan demikian dunia pedagang ka-ki lima menduduki fungsi ekonomi kota sekaligus turut membantu ke-hidupan ekonomi kota yang selaras dan serasi.

Pembinaan Kelembagaan Pedagang Sektor Informal

Dalam merumuskan suatu kebijaksanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor informal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai variabel yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yakni; (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) modal, (4) teknologi, dan (5) kelembagaan. Keberhasilan mengidentifikasi situasi dan kondisi perihal ke lima variabel tersebut sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijaksanaan untuk dapat dilaksanakan.

Di negara maju diidentifikasi bahwa mutu sumberdaya manusia sudah relatif tinggi, dan orientasi kelembagaan sudah mendukung gerakan pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu perhatian ditujukan pada faktor modal dan teknologi. Strategi pembangunan yang tepat berorientasi pada kepentingan investasi fisik (pembentukan modal) dikaitkan dengan teknologi yang mendukungnya, sehingga struktur produksi mereka relatif bersifat padat modal.

Bagi Indonesia strategi pembangunan yang mengutamakan va-

ribel modal dan teknologi tanpa adanya peningkatan mutu sumberdaya manusia atau perluasan kesempatan kerja atau perubahan kelembagaan, dalam catatan sejarah ternyata telah membawa kepada kesengsaraan rakyat. Pekerja sektor informal sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia dan komponen dalam masyarakat perlu diberikan tempat yang layak dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. Sektor informal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi kota di Indonesia. Ada dugaan semakin besar kota, semakin besar pula jumlah pekerja sektor informal walaupun kehadirannya juga sering menimbulkan beberapa permasalahan bagi pemerintah kota seperti: mengurangi ketertiban umum, sumber kemacetan lalu lintas, mengurangi keindahan kota dan sebagainya.

Keluhan yang timbul dari adanya sektor informal di perkotaan seringkali bersifat klise seperti di atas, nampaknya seperti masalah yang dilematis sementara yang dikalahkan adalah pihak yang lemah. Problem lokasi tampaknya menjadi isu sentral yang melatarbelakangi adanya keluhan tersebut. Masalahnya terletak pada bagaimana mengalokasikan tempat yang diperuntukkan bagi mereka, dan hal tersebut bukan hanya berarti menggiringnya ke dalam suatu tempat tertentu saja, namun harus pula memperhatikan masalah yang dihadapi para pedagang sektor informal ter-

sebut yang secara kasus-perkasus sangat bervariasi penyebabnya.

Kesulitan untuk mengatasi masyarakat dari kelemahan dan kemiskinan sangat erat dengan pola pengaturan kelembagaan dari masyarakat itu sendiri. Fenomena kemiskinan yang rumit dan kompleks merupakan fenomena organisasional yang ditentukan oleh pola organisasional masyarakat. Dengan demikian pendekatan institusional merupakan suatu pelengkap yang mutlak diperlukan di samping pelengkap-pelengkap pembangunan yang lainnya. Melalui institusi kekuatan-kekuatan dan potensi masyarakat yang tadinya tersebar diharapkan dapat terhimpun menjadi satu kekuatan bersama, yang saling menunjang dan melengkapi sehingga memiliki ketahanan hidup yang lebih tangguh. Dalam kaitannya ini diperlukan wadah yang dapat mewujudkan sektor informal menjadi suatu kekuatan ekonomi yang besar dan tangguh serta sebagai wadah pembinaan yang konsisten dan berkesinambungan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembinaan koperasi yaitu untuk tumbuh menjadi wadah utama pembinaan kemampuan golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya alternatif utama yang seyogyanya dipilih sebagai usaha pembinaan sektor informal adalah koperasi.

Koperasi dan Pembinaan Manajemen Pedagang Sektor Informal

UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan tentang makna koperasi di samping sebagai badan usaha, juga adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi diharapkan lebih berperan serta untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur, dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam kaitannya dengan sektor informal, khususnya dengan usaha pedagang kaki lima yang berdagang secara sendiri-sendiri, berlokasi dengan tempat/meja dasaran yang tersebar, maka pembinaan melalui koperasilah yang dipandang paling tepat.

Persoalan selanjutnya yang mungkin timbul adalah sistem pengorganisasian yang bagaimana yang dapat digunakan oleh koperasi dalam membina anggota-anggotanya yang adalah pedagang kaki lima, dengan kondisi serta karakteristik mereka seperti:

1. Dalam produksi misalnya, mereka tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi sendiri yang akan dijual, atau pada produsen lain yang berskala kecil dan berkemampuan rendah.
2. Permodalan pedagang kaki lima sangatlah sukar memperoleh pe-

luang kredit dalam jumlah yang besar dan tingkat bunga rendah.

3. Pemasaran mereka tidak mungkin mengembangkan aktivitas *public relation* dengan upaya periklanan yang luas.
4. Pembukuan dengan segala aspeknya seperti pembelanjaan, jurnal, neraca dan sebagainya mereka selenggarakan dengan sangat sederhana.

Persoalan-persoalan tersebut menyangkut pilihan prioritas atas pembinaan manajemen koperasi yang tepat pula, sementara tingkat respon mereka terhadap perubahan baik intern maupun ekstern relatif rendah.

Dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh pedagang sektor informal seperti dipaparkan di atas, maka perlu dirancang secara tepat sasaran dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan manajerial mereka. Dengan meningkatnya kemampuan manajerial pada gilirannya laba/keuntungan akan meningkat, tabungan mereka bertambah dan pada akhirnya kesejahteraan mereka beserta keluarganya juga akan meningkat. Hal tersebutlah yang seharusnya menjadi tujuan pemberian pembinaan bagi mereka.

Arah kebijaksanaan pembinaan yang perlu dipertimbangkan

dalam kerangka pewadahan me-reka ke dalam koperasi antara lain:

1. Frekuensi pembinaan, hendaknya perlu diintensifkan. Perhatian yang perlu dipertimbangkan ialah pengaturan waktu/jadwal pembinaan dengan memperhatikan kesibukan mereka dengan waktu senggangnya. Selain itu juga selektif memilih sasaran pembinaan, artinya pelaku usaha itu sendiri bukan keluarganya.
2. Pembinaan hendaknya dipilih dan menyertakan tenaga ahli manajemen perkoperasian sekurang-kurangnya untuk posisi penasihat (ahli), agar bobot pembinaannya benar-benar berkualitas. Dalam hal ini dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun Perguruan Tinggi.
3. Subtansi/materi pembinaan yang tepat sasaran, artinya disesuaikan dengan jenis-jenis usaha pedagang sektor informal tersebut. Semakin homogen jenis usahanya semakin mudah menyamakan materi, tetapi bagaimana mensiasati heterogenitas usaha tanpa menyulitkan pemahaman mereka.
4. Metode penyampaian hendaknya memenuhi kriteria menarik, luwes, sederhana, bervariasi sehingga dapat memberi kesan mendalam pada peserta binaan, sehingga materinya dapat diingat terus dan akhirnya diterapkan dalam realita kerja.

5. Perlu adanya penggalangan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, terutama lembaga penyalur program-program ban-tuan modal, teknologi, dan lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya.

Pelaksanaan Pembinaan Usaha Sektor Informal Studi Kasus di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo

Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur kegiatan usaha di sektor informal di Kabupaten Kulon Progo belum ada. Dengan demikian keberadaan kegiatan tersebut belum menimbulkan ancaman bagi pemerintah daerah dalam hal ketertiban. Berbeda halnya dengan kondisi kota Yogyakarta yang telah mengalami kesulitan pembinaan usaha sektor informal khususnya masalah pedagang kaki lima dimana usaha yang dilakukannya sudah mengkhawatirkan ketertiban kota dan menimbulkan kesan semrawut dan kumuh. Usaha sektor informal pada umumnya dan pedagang kaki lima pada khususnya sampai saat ini belum menimbulkan ancaman bahkan mereka justru mendapatkan dukungan penuh dengan berbagai fasilitas dan bantuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kegiatan pembinaan di tingkat ke-

camatan dilakukan dengan cara mengundang warga dan kelompok sasaran di kantor kecamatan ataupun di tempat yang telah ditentukan. Pihak kecamatan hanya berfungsi memberikan fasilitas dan pengarahan masa dari masyarakat di kecamatan. Selanjutnya pembicara dari para pejabat terkait dengan materi pembinaan ataupun peraturan yang akan disosialisasikan. Metode yang digunakan dalam proses sosialisasi adalah ceramah dan tanya jawab. Sosialisasi peraturan dan penyuluhan yang telah terlaksana antara lain:

1. Sosialisasi peraturan tentang perlindungan konsumen UU No.9/2001
2. Peraturan tentang perizinan usaha
3. Penyuluhan tentang pencemaran kegiatan limbah industri
4. Penyuluhan tentang wajib membuat laporan hasil produksi
5. Sosialisasi pola pengembangan jaringan warung masyarakat.
6. Sosialisasi pemberdayaan UKM
7. Revitalisasi kelembagaan koperasi

Usaha kecil seperti kerajinan dan sektor informal yang tumbuh berkembang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di Kecamatan Pengasih merupakan merupakan salah satu katup pengaman perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Hal itu dibuktikan ketika krisis moneter melanda negara Indonesia pada tahun 1997,

sektor industri kecil kerajinan justru tetap eksis bahkan tetap berkembang. Oleh karena itu usaha kecil tersebut terus selalu mendapat perhatian peningkatannya melalui berbagai bimbingan teknis peningkatan mutu dan deversifikasi usaha.

Jika saat krisis berdampak buruk pada perusahaan lain sehingga banyak karyawan yang di PHK, namun sektor informal dan kerajinan justru tetap bertahan. Dalam menangani permasalahan pembinaan sektor industri kecil dan sektor informal di Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh Dinas Perindagkop-tam. Berbagai Kegiatan yang telah dilakukan dalam usaha pembinaan manajemen sektor informal di Kecamatan Pengasih sejak 2003 antara lain:

1. monitoring dan evaluasi usaha industri kecil, perdagangan dan koperasi dilakukan untuk mengetahui:
 - a. data perkembangan jumlah sentra industri kecil yang ada di tingkat kecamatan untuk bahan pengambilan keputusan dalam pembinaan.
 - b. informasi tentang masalah-masalah produksi, bahan baku, tenaga kerja, pemasaran
 - c. perizinan yang harus dimiliki oleh pengusaha

- d. pembuatan laporan produksi
- e. informasi tentang nasabah, penguatan modal dan proses pengembalian pinjaman dan dana bergulir
- f. informasi perkembangan koperasi : modal, kelembagaan, keanggotaan, usahanya, pemetaan kinerja koperasi dan lain-lain.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan dalam beberapa kali di beberapa tempat, dengan menggunakan dana APBD dimana setiap kali kegiatan dana yang disalurkan untuk kegiatan tersebut berkisar antara satu juta sampai dengan dua juta rupiah.

2. Pelatihan ketrampilan teknis, peningkatan mutu dan penambahan wawasan.

Menyadari permasalahan umum yang dihadapi oleh para pengusaha sektor informal yang antara lain berkaitan dengan kurangnya kemampuan baik yang bersifat teknis maupun wawasan bisnis maka diupayakan adanya kegiatan pelatihan dengan harapan ketrampilan meningkat, kualitas produk meningkat, diversifikasi usaha, selanjutnya akan meningkatkan pendapatan pengusaha. Adapun jenis pelatihan yang pernah diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Pelatihan ketrampilan teknik industri kecil empon-empon.

- b. Pelatihan peningkatan mutu dan desain industri kecil enceng gondok.
- c. Magang Tape ketela desa Simoyo Kecamatan Pengasih Ku-lon Progo ke Tasikmalaya Ja-wa Barat.
- d. Magang Jenang Alot ke Garut Jawa Barat.
- e. Pelatihan ketrampilan industri kecil bambu.
- f. Pelatihan peningkatan mutu industri kecil gula aren.
- g. Penyuluhan pengembangan sistem informasi pasar, yang merupakan proyek pengembangan perdagangan dalam negeri Dinas Perindag Propinsi DIY. Materi penyuluhan adalah monitoring, pengolahan data, analisis data, penyebaran informasi harga kebutuhan pokok melalui penyiaran radio (RAM)
- h. Penyuluhan perizinan pendirian koperasi
- i. penyuluhan kelembagaan KUD dan non KUD.
- j. Pelatihan manajemen usaha kecil
- k. Uji coba standarisasi pengembangan akuntabilitas akuntansi dan SPI KUKM
- l. Diklat pengembangan manajemen koperasi dengan konsep TQM
- m. Pengembangan jaringan masyarakat, berkaitan peningkatan wawasan tentang jari-

- ngan usaha tawar menawar dalam pengadaan produk-nya.
- n. Pengembangan jaringan informasi dan akses pasar.
 - o. Pengembangan kewirausahaan
3. Bantuan modal, fasilitas untuk usaha, dan pemasaran
- a. Bantuan Modal untuk Usaha yang besarnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan usaha berasal dari:
 - (1). Program Pengembangan Kecamatan dari Dirjen Bina PEMBERDAYAAN Departemen Dalam Negeri.
 - (2). Dana APBD
 - (3). Dana APBN
 - (4). Investor dalam negeri (Mustika Ratu)
 - b. Bantuan Fasilitas Usaha baik dari dana APBD maupun hibah berupa: 1). Bor listrik sejumlah dua buah, 2). Gergaji sejumlah potong empat buah, 3). Pisau sejumlah 10 buah, 4). Oven pengering satu unit, 5). wajan, 6). las plastik empat buah, 7). pengaduk lima buah, 8). mesin giling, 9). Pisau panjang, 10). alat gilas/rol tiga buah, 11). guntuing sejumlah 20 buah, 12). mal/matras sejumlah 20 buah, 13). bantuan peralatan kerajinan sabut kelapa.
 - c. Bantuan Pemasaran telah dilakukan dengan melalui penyelenggaraan:

(1) Penyebaran informasi baru tentang produk-produk yang dihasilkan melalui radio dan door to door ke pengusaha untuk informasi pameran dan peluang lainnya.

(2) Promosi dan kemitrausahaan

(3) Peningkatan pemasaran industri kecil rumah tangga

(4) Promosi dan Pameran Dagang Tingkat Nasional dengan dana APBD sebesar Rp 100.740.000 (Pameran produk ekspor, Inacraf, Festival Nusa Dua Bali)

(5) Promosi dan Pameran Dagang Tingkat Daerah dengan APBD sebesar Rp 102.102.500,- (PODA, Tasikin, FKY, Manunggal Fair, Pasar Rakyat)

Penutup

Berdasarkan penyajian dan pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pembinaan manajemen usaha sektor informal di Kecamatan Pengasih menjadi otoritas formal dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan Kabupaten Kulon Progo.
2. Pembinaan yang dilakukan dalam bidang perindustrian meliputi monitoring sentra industri

kecil, evaluasi pencegahan pencemaran, perizinan dan laporan produksi, penguatan modal industri, pelatihan ke-trampilan teknis dan peningkatan mutu, pendataan potensi industri.

3. Pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan meliputi peningkatan pemasaran, pengembangan sistem informasi pasar, peningkatan kualitas SDM pedagang, meningkatkan kemampuan permodalan, melaksanakan promosi dan kemitrausahaan, pembinaan perizinan, perlindungan konsumen, peningkatan peran lembaga perdagangan di kegiatan promosi.
4. Pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan perkoperasian: penilaian kesehatan koperasi, monitoring perkembangan koperasi, monitoring dana bergulir, penyuluhan perizinan pendirian koperasi, penyuluhan kelembagaan KUD dan non KUD, pelatihan manajemen usaha kecil, sosialisasi penguatan modal dari BUMN.

Daftar Pustaka

- Astrid S. Susanto. 1977. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Binacipta.
- Biro Bina Sosial. 1995. *Sektor Informal*. Jakarta: Depsos, Biro Bina Sosial.
- Gumilar, *Kompas*, 3-3-99

Manning, Cris dan Tadjudin Nur Effendi. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Gramedia.

Sri Edi Swasono. 1994. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demo-krasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press.

Suharsimi Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.

Suharsono Sagir. 1989. *Membangun Manusia Karya: Masalah Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Tadjudin Noer Effendi. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluan Bekerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Webster's New Encyclopedic Dictionary, 1994

Biodata Penulis:

Penulis adalah Dosen FISE UNY Prodi Administrasi Perkantoran. Pendidikan S1 Jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM tahun 1983 dan S2 pada jurusan yang sama 1993. Mengajar dalam beberapa mata kuliah antara lain: Manajemen, Manajemen Keuangan, Kepemimpinan, Hukum Administrasi Negara dan lain-lain. Aktif menulis dalam majalah ilmiah: Efisiensi, Informasi, Cakrawala Pendidikan.